

**PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH,
BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Budi Utami
NIM. 14.0102.0005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH,
BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Budi Utami
NIM. 14.0102.0005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)
Dipersiapkan dan disusun oleh:

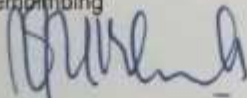
Budi Utami

NPM 14.0102.0005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **15 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.
Pembimbing I

Pembimbing II

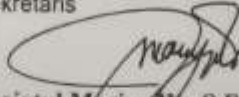
Tim Penguji


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Sekretaris


Faqiatul Mariya W., S.E., M.Si.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal **03 SEP 2018**

Dra. Marlisa Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Utami
NIM : 14.0102.0005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 29 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Budi Utami
NIM 14.0102.0005

RIWAYAT HIDUP

Nama : Budi Utami
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 08 Juli 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jurang RT 07 Rw 04, Pirikan, Secang, Magelang
Alamat Email : budiutami457@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar (2000-2006) : SD Negeri Pirikan
SMP (2006-2009) : SMP Negeri 2 Secang
SMA (2009-2012) : SMK Negeri 3 Magelang
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang bidang keagamaan 2014-2015
- Kepala Bidang Kewirausahaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang 2015-2016
- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Universitas Muhammadiyah Magelang Divisi Keagamaan 2015-2016

Magelang, 29 Agustus 2018
Peneliti,

Budi Utami
NPM. 14.0102.0005

MOTTO

“.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya: dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Ar-Ra'd ayat 11)

“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”

(HR, Ibnu Abdil Barr)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) “**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selain penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang dan selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si. dan Ibu Faqiatul Mariya W., S.E., M.Si. yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran serta memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi saya.
3. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menuntun saya selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan tahun 2014.
5. Ibu Istadiyah dan Bapak Sumadiyo, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan kasih sayangnya serta memfasilitasi semua kebutuhan saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
6. Heni Fitriyaningsih, S.P., kakak yang selalu ada untuk saya dan mendukung sehingga dapat terselesaikan studi ini.
7. Acep Mahmut Dianto yang selalu menyayangi dan mengasahi serta memberikan dorongan demi keberhasilan saya.
8. Keluarga besar saya yang telah mendukung serta mendo'akan.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi 2014 khususnya 14 A yang telah memberikan motivasi dan kesan semasa kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar / grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	13
1. Teori <i>Stewardship</i>	13
2. Keuangan Daerah.....	14
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	15
4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	15
5. Pendapatan Asli Daerah.....	17
6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	19
7. Belanja Modal.....	19
8. Belanja Pegawai.....	20
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	21
C. Perumusan Hipotesis	23
D. Model Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	29
B. Data Penelitian	30
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	30
D. Metode Analisis Data	31
1. Statistik Deskriptif.....	31
2. Uji Asumsi Klasik.....	32
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
E. Pengujian Hipotesis.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sampel Penelitian	38
B. Statistik Deskriptif	38
C. Uji Asumsi Klasik	42
1. Uji Normalitas	42
2. Uji Multikolinearitas	42
3. Uji Autokorelasi	43
4. Uji Heterokedastisitas.....	44
D. Analisis Regresi Linier Berganda	44
E. Uji Hipotesis	46
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
2. Uji Statistik F	46
3. Uji Statistik t.....	47
F. Pembahasan	49

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan Penelitian	56
C. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	----

LAMPIRAN	60
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY	3
Tabel 1.2 Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Pemerintah DIY.....	3
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pemerintah DIY.....	4
Tabel 1.4 Rasio Kemandirian Keuangan DIY Tahun 2016	6
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	16
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	19
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	30
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin Watson</i>	33
Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	38
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokolerasi.....	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi Setelah Pengobatan.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t.....	46

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 2.1 Model Penelitian	28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji Statistik F.....	36
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Positif.....	37
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Negatif.....	37
Gambar 4.1 Penerimaan Uji Statistik F.....	47
Gambar 4.2 Penerimaan Uji t Variabel Kinerja Pendapatan Asli Daerah.....	48
Gambar 4.3 Penerimaan Uji t Variabel Belanja Modal.....	48
Gambar 4.4 Penerimaan Uji t Variabel Belanja Pegawai.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pemerintah Daerah Sampel Penelitian	61
Lampiran 2. Data-Data Variabel Penelitian	62
Lampiran 3. Uji Statistik Deskriptif	66
Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik	67
Lampiran 5. Koefisien Regresi	69
Lampiran 6. Tabel T	70
Lampiran 7. Tabel F	71

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

**Oleh:
Budi Utami**

Kemandirian keuangan daerah dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Namun, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 5 Kabupaten/Kota. Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: *Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia telah berjalan lebih dari 15 tahun sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI (Indonesia, 2014). Salah satu tujuan otonomi daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang diharapkan kedepannya tercapai kemandirian keuangan daerah. Otonomi daerah tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan, di mana kewenangan yang menuntut pemerintah daerah untuk menggali pendapatan asli daerahnya secara optimal.

Menurut Halim & Kusufi (2012), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian keuangan daerah

mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Indikator kemandirian daerah dapat ditunjukkan dengan rasio kemandirian daerah yang merupakan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman pihak eksternal. Apabila rasio kemandirian keuangan daerah nilainya di atas 50% dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi.

Kemandirian keuangan daerah dapat tercipta apabila pemerintah daerah dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien. Namun yang terjadi saat ini, pemerintah daerah di Indonesia memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang masih mendominasi dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan visualisasi data APBD 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 22,63% dari total penerimaan daerah, sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 62,81%, dan sisanya sebesar 14,55% berasal dari pendapatan lain-lain (djpk.kemenkeu.go.id).

Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga perlu dilihat kinerja Pendapatan Asli Daerah tersebut melalui perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan. Apabila realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah

Daerah maka dapat dikatakan kinerja Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah tersebut semakin efektif (Ernawati & Riharjo, 2017).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2011	867,112,885,352
2012	1,004,063,125,812
2013	1,216,102,749,617
2014	1,464,604,954,200
2015	1,593,110,769,595
Rata-rata pertumbuhan	16.42%

Sumber: dppka.jogjaprovo.go.id (2016).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 16.42% per tahun. Meskipun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah relatif tinggi, namun hingga saat ini belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih ditopang oleh dana perimbangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga diiringi dengan peningkatan Dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan 9,06% per tahun (dppka.jogjaprovo.go.id, 2016). Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah tabel rata-rata pertumbuhan dana perimbangan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011-2015:

Tabel 1.2
Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Dana Perimbangan
2011	722,339,653,053
2012	894,544,324,851

Tabel 1.2
Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta
(Lanjutan)

Tahun	Dana Perimbangan
2013	957,561,850,914
2014	1,013,811,389,590
2015	1,021,886,268,197
Rata-rata pertumbuhan	9,06%

Sumber: dppka.jogjaprovo.go.id (2016).

Selain kinerja Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemandirian keuangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti belanja modal dan belanja pegawai. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila sarana dan prasarana daerah memadai, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada produktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Artinya, jika belanja modal meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi belanja pegawai masih lebih besar daripada belanja modal.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total Belanja
2012	216.419.982.440	572.023.717.192	2.053.825.959.467
2013	369.395.794.039	634.832.119.680	2.509.643.375.218
2014	442.446.473.601	623.924.262.660	2.981.068.320.421
2015	627.602.185.565	669.544.757.882	3.496.425.502.266
2016	836.873.712.179	707.929.899.607	3.847.962.965.847

Sumber: Resume Laporan Realisasi APBD

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012-2015 cenderung lebih besar dialokasikan untuk belanja pegawai daripada dialokasikan untuk belanja pembangunan. Besarnya belanja pegawai dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga harapan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah akan sulit tercapai.

Berdasarkan laporan *local budget analysis* (LBA) oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), untuk Pulau Jawa hanya empat provinsi yang masuk dalam data penelitian. Provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Barat hanya diambil 7 daerah dari 27 Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah diambil 9 daerah dari 35 Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur diambil 5 daerah dari 37 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diambil 4 daerah dari 5 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah tertinggi di Pulau Jawa adalah Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 32%.

Apabila dilihat dari jumlah daerah yang diteliti dibandingkan total daerah yang ada di masing-masing provinsi, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap dapat menggambarkan kondisi sebenarnya tingkat

kemandirian keuangan di provinsi tersebut. Selain itu, berdasarkan visualisasi data APBD, dari keempat provinsi tersebut hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak termasuk dalam 10 provinsi tertinggi realisasi pendapatan daerah tahun 2016. Sehingga penelitian ini menggunakan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Tabel 1.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten	Rasio Kemandirian Keuangan
Kab. Bantul	17%
Kab. Gunung Kidul	10%
Kab. Kulon Progo	12%
Kab. Sleman	26%
Kota Yogyakarta	- *
Rata-rata	13%

*Data tidak tersedia dalam laporan *local budget analysis* (LBA)

Sumber: (Hasan & Nurhidayat, 2017)

Tabel 1.4 menunjukkan rasio kemandirian keuangan masing-masing Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, rasio kemandirian keuangan untuk Kota Yogyakarta tidak tertera dalam tabel 1.4 dikarenakan Kota Yogyakarta tidak masuk dalam daftar obyek penelitian laporan *local budget analysis* (LBA)) oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 masih relatif rendah yaitu sebesar 13%. Hal ini dapat menandakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan pendapatan masih rendah dan pembiayaan masih menggantungkan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah masih memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Ernawati & Riharjo (2017) tentang pengaruh kinerja pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono & Oktavianti (2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ariani & Putri (2016) menelitian terkait pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ernawati & Riharjo (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Imawan & Wahyudin (2014) dan Darwis (2015) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Arah pengaruh negatif dan signifikan tersebut dikarenakan belanja modal masih kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah.

Selain penelitian terkait pengaruh kinerja Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, terdapat juga penelitian mengenai belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Darwis (2015) pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Simatupang (2016) tentang pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara menyatakan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja dalam struktur APBD cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga mengurangi kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawati & Riharjo (2017) tentang pengaruh kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernawati & Riharjo (2017) yaitu menggunakan variabel kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan perbedaannya yaitu **pertama** menambahkan variabel belanja pegawai, karena besarnya belanja pegawai dapat mendorong kinerja dari perangkat daerah yang berperan mengelola kegiatan operasional

pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan pelayanan publik. Namun, besarnya alokasi belanja pegawai dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah dan menghambat laju pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu namun lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi yaitu terkait pembangunan daerah. Secara logika, dari pandangan teori *stewardship* belanja pegawai yang lebih besar jika dibandingkan belanja modal akan mengurangi pencapaian tujuan organisasi. Sehingga upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2015).

Perbedaan **kedua**, objek penelitian yang digunakan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya, meskipun Pendapatan Asli daerah meningkat 16,42% per tahun, belum dapat mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan juga meningkat. Hal ini dikarenakan dana perimbangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,06% per tahun (dppka.jogjaprov.go.id, 2016). Selain itu, berdasarkan laporan hasil analisis anggaran daerah, sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 13% (Hasan & Nurhidayat, 2017). Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Perbedaan **ketiga**, menambah rentang waktu penelitian yaitu 7 tahun dari tahun 2010 sampai 2016 yang sebelumnya hanya dilakukan 4 tahun. Alasannya agar dapat digunakan sebagai perbandingan antar tahun serta diharapkan memperoleh hasil yang lebih *valid*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan Ilmu akuntansi sektor publik terkait kemandirian keuangan daerah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pelaksanaan otonomi daerah, dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerahnya guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan bentuk ringkas dari keseluruhan penelitian serta gambaran dari permasalahan yang diteliti yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis dalam penelitian ini.

Bab ini juga akan menggambarkan model dari penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, analisis data penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian serta saran peneliti mengenai hasil penelitian dan saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori tersebut mengasumsikan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu namun lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Anton, 2010).

Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan atau penatalayanan yang menggambarkan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi (Ernawati & Riharjo, 2017). Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan *non profit* lainnya. Tujuan dari organisasi sektor publik yaitu memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi penelitian ini, teori *stewardship* mengimplikasikan bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan kepentingan publik sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward*, maka rakyat selaku *principal* akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah. Pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri (Ernawati & Riharjo, 2017).

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2012). Berdasarkan definisi tersebut dapat difahami bahwa keuangan daerah tidak terbatas pada uang dalam bentuk kas, namun juga mencakup uang dalam bentuk non-kas, seperti aset tetap berwujud.

Guna mencapai tujuan pemerintahan, keuangan daerah harus dikelola dengan baik. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung mencaup Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (Halim & Kusufi, 2012).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim & Kusufi, 2012).

APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutup biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Halim & Kusufi, 2012).

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman pihak eksternal. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sedangkan kondisi dimana pemerintah daerah lebih besar mendanai belanjanya dengan mendasarkan pada dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri dinamakan *flypaper effect* (Pratolo dkk, 2016).

Tabel 2.1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan	Rasio (%)	Pola
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Mahsun, 2006 (dalam Darwis, 2015)

Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila rasio kemandirian 0% - 25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali dan sangat bergantung kepada pemerintah pusat (pola hubungan instruktif).
- b. Apabila rasio kemandirian 25% - 50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah dan dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari pemerintah. Sehingga, daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif).
- c. Apabila rasio kemandirian 50% - 75%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang dan dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).
- d. Apabila hasil rasio kemandirian 75% - 100%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (Pratolo dkk, 2016). Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2004). Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah, yaitu penerimaan pemerintah daerah dari iuran wajib dari masyarakat yang dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.
- b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan, yaitu penerimaan pemerintah daerah dari hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan seperti bagian laba dari BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang Sah, yaitu penerimaan asli daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan seperti pendapatan bunga, jasa giro, dan lain-lain.

Menurut Marizka (2013), jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Oleh karena itu, jika pendapatan asli daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat.

6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kinerja Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), maka akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh (Halim & Kusufi, 2012). Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Rasio efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	<75

Sumber: Mahmudi, 2010 (dalam Ernawati & Riharjo, 2017)

7. Belanja Modal

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2012). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Indonesia, 2010).

Belanja modal meliputi, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

8. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Darise, 2007). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (Indonesia, 2004).

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan Kemampuan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai didasari oleh prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi (Darise, 2007). Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah bentuk pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Imawan & Wahyudin (2014)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012	<p>a. Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>b. Ukuran dan <i>Wealth</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>c. <i>Ileverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>
2.	Darwis (2015)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian	a. Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.	Sumatera Barat pada tahun 2009-2013
3.	Tjahjono & Oktavianti (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY	a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. b. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4.	Ariani & Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	a. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. b. DAU berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
5.	Simatupang (2016)	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (2010-2013)	a. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. b. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. c. Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6.	Ernawati & Riharjo (2017)	Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	a. Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2015.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			b. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2015.

Sumber: berbagai jurnal dan artikel yang diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (Pratolo dkk, 2016). Artinya Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Apabila struktur pendapatan asli daerahnya sudah kuat maka daerah tersebut memiliki struktur pembiayaan yang tinggi dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Melalui kinerja Pendapatan Asli Daerah yang optimal, kemandirian keuangan suatu daerah dapat tercapai sehingga kualitas pelayanan terhadap publik juga dapat ditingkatkan.

Menurut Ernawati & Riharjo (2017), kinerja Pendapatan Asli Daerah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas yang menggambarkan

kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Artinya daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya dan ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang mengelola keuangan daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada publik. Selain memberikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus memaksimalkan dalam menjalankan pemerintahan guna tercapainya tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila terjadi konflik kepentingan antara pihak *steward* dengan masyarakat, *steward* akan berusaha bekerja sama untuk menyelesaikan konflik tersebut guna mencapai tujuan pemerintah. Tercapainya tujuan pemerintah melalui kinerja yang dilakukan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2011) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Riharjo (2017) yang menunjukkan bahwa Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

H₁. Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2012). Pemerintah daerah sebagai *steward* dituntut untuk mengelola belanja modal dengan baik dan tepat sasaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Pengelolaan belanja modal yang optimal membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah (*steward*) dengan rakyat agar memberikan kepuasan bagi publik serta dapat mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah (*steward*) berkewajiban mengelola belanja modal sesuai dengan kepentingan pemilik atau rakyat, serta lebih mengedepankan kerja sama guna mencapai tujuan organisasi.

Putri & Sjadili (2013) menyatakan bahwa, upaya peningkatan kemandirian keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, seperti meningkatkan proporsi belanja modal untuk pembangunan sektor yang produktif di daerah. Pelaksanaan otonomi memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber

keuangan yang ada sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila sarana dan prasarana daerah memadai, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada produktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Artinya, semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan dari suatu daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani & Putri (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sari (2015) dan Ernawati & Riharjo (2017) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H₂. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

3. Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Darise (2007) mendefinisikan belanja pegawai sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya

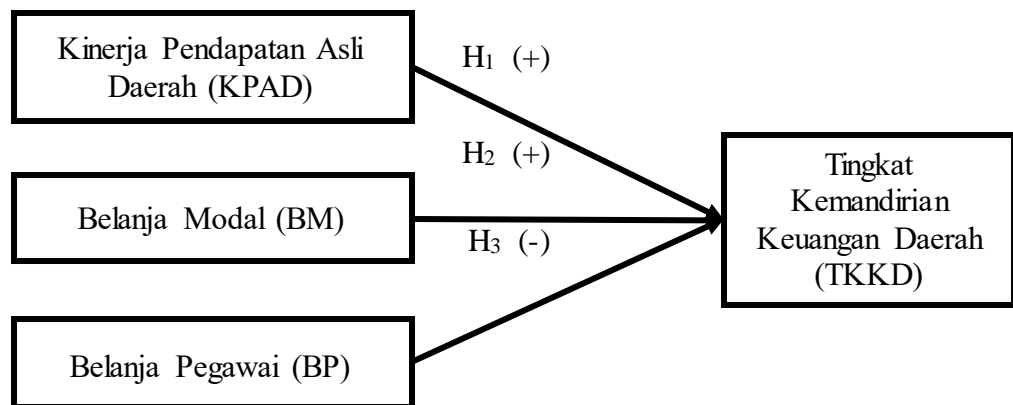
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui pengalokasian belanja pegawai yang memadai, kualitas kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan. Perangkat daerah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan fungsinya akan menerima imbalan berupa gaji dan tunjangan (termasuk ke dalam belanja pegawai). Sehingga perangkat daerah tersebut harus bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya, guna memenuhi pelayanan terhadap masyarakat. Apabila sistem dalam tatanan pemerintahan atau kinerja para perangkat daerah selaku *steward* berjalan dengan baik, maka kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.

Menurut Darwis (2015), Belanja pegawai dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pengaruh positifnya yaitu besarnya belanja pegawai dapat mendorong produktifitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan belanja pegawai dapat berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah apabila porsi belanja pegawai lebih besar dari belanja pembangunan atau belanja modal. Besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Jika hal tersebut terjadi dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2015) yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H₃. Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

4. Model Penelitian



**Gambar 2.1
Model Penelitian**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling* untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria. Menurut Sugiyono (2014), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerbitkan laporan realisasi APBD berturut-turut antara tahun 2010-2016 pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian, meliputi data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, belanja pegawai secara berturut-turut dari tahun 2010- 2016.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka rasio untuk dianalisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2016.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh melalui website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1.	Variabel Dependen	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2012).	Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah /Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman) X 100% (Halim & Kusufi, 2012)

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
2.	Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (Pratolo dkk, 2016).	Rasio Efektivitas = (Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah/ Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah) x 100% (Halim & Kusufi, 2012)
	a. Kinerja Pendapatan Asli Daerah		
	b. Belanja Modal	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2012)	Rasio Belanja Modal = (Belanja Modal/Total Belanja Daerah) x100% (Simatupang, 2016)
	c. Belanja Pegawai	Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Darise, 2007)	Rasio Belanja Pegawai = (Belanja Pegawai/ Total Belanja Daerah) x100% (Simatupang, 2016)

Sumber: data diolah, 2018

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata

(*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, serta *skewness* (kemiringan distribusi) (Ghozali, 2013:19).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengakui distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160).

Uji statistik untuk mendeteksi residual terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

- 1) Jika nilai probabilitas $>$ taraf signifikan yang ditetapkan (0.05), maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Jika nilai probabilitas $<$ taraf signifikan yang ditetapkan (0.05), maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel

independen. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat digunakan nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $< 0,01$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dan tingkat kolerasi antar variabel di atas 95%, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi (Ghozali, 2013:105).

c. Uji Autokolerasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t - 1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Salah satu cara untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi atau tidak dapat digunakan uji DW (*Durbin Watson*) (Ghozali, 2013:110).

Uji *Durbin Watson* hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du < d < 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2013:111.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian statistik dilakukan dengan uji *Park*. Kriteria uji heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139):

- 1) Jika nilai *Sig* < 0,05 atau memiliki variabel yang signifikan, maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas,
- 2) Jika nilai *Sig* > 0,05 atau tidak memiliki variabel yang signifikan maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

$$\text{TKKD} = \alpha + \beta_1\text{KPAD} + \beta_2\text{BM} + \beta_3\text{BP} + e$$

Keterangan:

TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

KPAD = Kinerja Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

BP = Belanja Pegawai

e = *Error terms*

E. Pengujian Hipotesis

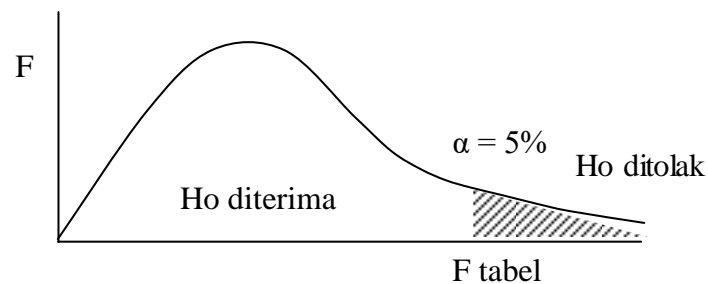
1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Kelemahan dari koefisien determinasi yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Sehingga dianjurkan menggunakan nilai *Adjusted R²*. Apabila nilai *Adjusted R²* mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai *Adjusted R²* mendekati satu, maka variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependennya.

2. Uji Statistik F (*Goodnes of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau menguji apakah model yang digunakan cocok (*fit*) atau tidak (Ghozali, 2013:98). Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1, dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model regresi yang digunakan cocok (*fit*).
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya model yang digunakan tidak cocok (*tidak fit*).



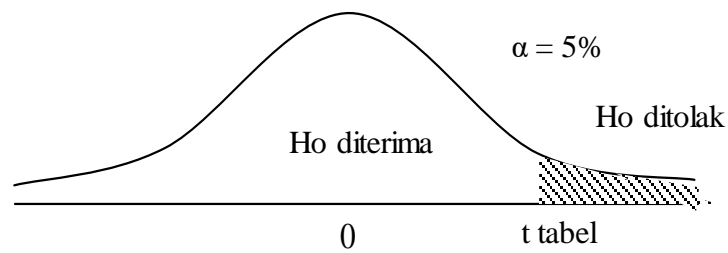
Gambar 3.1
Penerimaan Uji Statistik F

3. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Penentuan nilai t tabel menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tile test*).

a. Hipotesis Positif

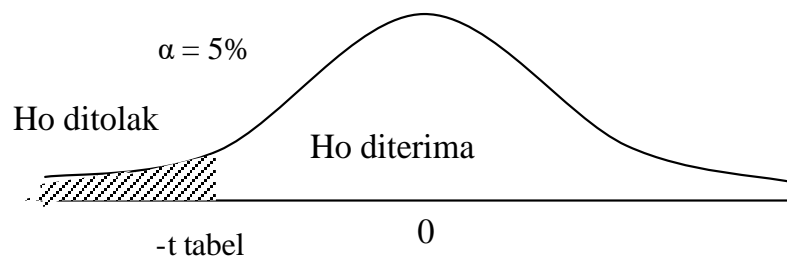
- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif

b. Hipotesis Negatif

- 1) Ho ditolak jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Ho diterima jika $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Objek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan periode waktu selama 7(tujuh) tahun.

Hasil *Adjusted R²* menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai mampu menjelaskan variasi variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 59,1%, sedangkan sisanya 40,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah secara baik dan model yang digunakan dalam penelitian ini sudah *fit*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dependen yaitu kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai yang hanya mampu menjelaskan 59,1% faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tingkat kemandirian keuangan daerahnya sangat rendah. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Rentang waktu yang digunakan selama 7 tahun yaitu dari tahun 2010-2016 sehingga belum dapat digeneralisasi.
4. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti ukuran pemerintah daerah dan *wealth* (kemakmuran).
2. Penelitian selanjutnya dapat memeliti Provinsi lain yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerahnya tinggi agar dapat membandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berbeda.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian agar lebih mampu dilakukan generalisasi atas data penelitian tersebut.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama namun dengan metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah*, 1(2).
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call For Syariah Paper*, 364–369.
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: PT Indeks.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16.
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keem)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M., & Nurhidayat, Y. (2017). *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Retrieved from www.seknasfitra.org
- [http: www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155.
- Indonesia, R. (2004a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat. Artikel Ilmiah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Pratolo, S., & dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi-Untuk Akademisi dan Praktisi)*. Yogyakarta: LP3M-UMY.
- Putri, F. G. M., & Sjadili, E. H. (2013). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Artikel*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Siagian, S. N. (2014). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Simatupang, F. F. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

- Simbolon, B. P. J. (2011). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2016). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*, 24(1), 25–34.